

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah pembangunan olahraga di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik nasional. Pada tahun 1948, atlet-atlet yang menjadi bagian delegasi Indonesia untuk Olimpiade di London tidak diterima oleh *International Olympic Committee (IOC)*. Tidak diakuinya dunia atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pada saat itu menjadi penyebab tidak terdaftarnya badan olahraga resmi Indonesia, yakni Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) menjadi anggota *IOC*. Hal ini menyebabkan para atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi. Delegasi Indonesia sempat diizinkan mengikuti apabila para atlet bersedia menggunakan paspor Belanda.¹

Menanggapi persoalan Olimpiade London 1948 ini, Pengurus Besar PORI segera melakukan konferensi darurat. Konferensi darurat ini menghasilkan kesepakatan untuk menyelenggarakan PON. Rencananya, PON sebagai ajang kompetisi olahraga nasional akan diselenggarakan di Surakarta pada bulan Agustus atau September 1948. Penyelenggaraan PON ini merupakan yang pertama di masa kemerdekaan. Pelaksanaan PON I menunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat dapat merespon blokade Belanda dan berperan strategis dalam revolusi kemerdekaan.

¹ Noor Brahimi, “*PON Pekan Olahraga Nasional*”, (Jakarta: Sketsa Aksara Lalitya, 2010), hal. 4.

Menurut Harsuki, dalam perjalanan sejarah olahraga di Indonesia, Interaksi yang terjalin antara politik dan olahraga di Indonesia sudah berlangsung sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan dengan menempatkan olahraga sebagai alat pemersatu bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan terselenggaranya PON I di Solo pada tahun 1948.² Dalam konteks ini, tujuan pelaksanaan olahraga yakni sebagai alat pemersatu dan perjuangan bangsa serta mempunyai tujuan filosofis yang lainnya seperti kesegaran jasmani, keterampilan, kecerdasan, sikap, dan perilaku untuk menjunjung tinggi sportifitas.

Tujuan pelaksanaan PON I ini sejalan dengan pelaksanaan PON di tanah air yang memiliki nilai sejarah dalam proses kehidupan dan penunjang negara seperti kestabilan dari setiap daerah dalam berpartisipasi pada kompetisi olahraga. Nilai-nilai tersebut harus kita pelihara dan kembangkan sejalan dengan perkembangan bangsa dan negara indonesia. Penyelenggaraan PON I di Solo Tahun 1948 tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia yang pada waktu itu bertekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat penuh.³

Hasil dan manfaat penyelenggaraan PON telah diketahui dan rasakan bersama, terutama turut serta dalam proses terwujudnya stabilitas politik melalui persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, penyelenggaraan PON perlu kita kembangkan dan tingkatkan baik

² Harsuki, "*Olahraga dan Integrasi Bangsa*", (Jakarta: Ditjen Olahraga, 2002), hlm. 10.

³ *Op.Cit.*, hlm. 5.

fungsi dan kedudukan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat maupun sarana penyelenggaraan sesuai dengan perkembangan dan pengembangan olahraga Indonesia.

Sorip Harahap menjelaskan tentang perkembangan antara olahraga dengan politik pada era kepemimpinan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto. Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan pada masa tersebut terjadi ketika pelaksanaan PON ke VI batal untuk diselenggarakan.⁴

Selang 4 tahun berjalan, setelah kondisi dan situasi pasca G30S/PKI 1965⁵ mulai membaik, maka pelaksanaan PON ke VII kembali diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1969. Alasan penunjukan Surabaya yang merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Timur tersebut bukan tanpa sebab, akan tetapi juga mengandung kepentingan antara olahraga dengan politik serta erat kaitannya juga dengan bidang ekonomi dan kekuatan militer yang berperan penting sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan yang merupakan ciri khas pemerintahan pada masa Orde Baru.

Kemudian setelah melihat potensi Kota Surabaya menuai keberhasilan dalam Penyelenggaraan PON VII tahun 1969, yang di mana sedang dalam masa

⁴ Sorip Harahap, "*PON I-X Sejarah Ringkas dan Perkembangannya*", (Jakarta: Kantor KONI Pusat, 1985), hlm 1-2. Inilah PON VI, yang tak pernah kunjung datang dan sebagai akibatnya, kejuaraan-kejuaraan nasional terpaksa ditiadakan. Hal ini dikarenakan terjadi peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/PKI) pada tahun 1965. Persiapan untuk pelaksanaan PON VI kurang memadai dapat dibayangkan apabila G30S/PKI meletus di tengah- tengah penyelenggaraan PON VI. Oleh karena itu PON VI tidak dipertandingkan atau dibatalkan, sehingga pada tahun 1966 kegiatan-kegiatan olahraga dilakukan melalui Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL) di berbagai Provinsi.

⁵ *Op.Cit.*, hlm.19.

peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, bisa terlaksana sampai selesai. Pengembangan dan prestasi olahraga Indonesia di tingkat Asia Tenggara, Asia dan dunia harus dijadikan sasaran utama dalam pembinaan olahraga prestasi saat ini dan prestasi yang akan datang. Oleh karena itu berbagai upaya harus dilaksanakan melalui pendekatan yang terarah dan terpadu. Memperhatikan kondisi keolahragaan dan kondisi ekonomi Indonesia, maka penyelenggaraan PON XV Tahun 2000 perlu mendapat perhatian secara khusus.

Setelah tujuh kali berturut-turut PON diselenggarakan di Jakarta, pada tahun 2000 penyelenggaraan dilaksanakan di luar kandang. Jawa Timur adalah daerah di luar Jakarta yang dipercaya dapat mensukseskan penyelenggaraan PON XV-2000. Kesuksesan PON XV-2000 Jawa Timur menjadi uji coba, sekaligus barometer untuk penyelenggaraan PON berikutnya bisa dilanjutkan penyelenggaraannya di luar Jakarta, atau ditarik kembali ke kandang, yakni ke Jakarta sebagai tuan rumah tetap PON. Seharusnya, pengalaman Surabaya sebagai tuan rumah PON VII 1969 bisa menjadi jaminan Jawa Timur untuk mendulang sukses penyelenggaraan yang mana dalam sejarah PON, Surabaya menjadi tuan rumah PON VII dari tanggal 26 Agustus hingga 6 September 1969 yang terbilang sukses meski keadaan Jawa Timur saat itu sedang krisis.⁶

Jawa Timur ditunjuk menjadi tuan rumah PON XV-2000 oleh Wismoyo Arismunandar, yang saat itu menjabat sebagai ketua umum KONI Pusat. Ditunjuknya Jawa Timur menjadi tuan rumah PON pada tahun 1997 bukan

⁶ Kharisma Purnamasari, *“Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke VII tahun 1969 di Surabaya”* FIB, UNAIR, 2013.

tanpa alasan, namun karena Jawa Timur khususnya Surabaya sudah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan PON. Kali ini, Surabaya kota terbesar kedua di Indonesia, kembali menjadi tuan rumah PON XV-2000 setelah menjadi tuan rumah PON VII-1969. Sebab Surabaya memiliki fasilitas olahraga yang cukup lengkap dan menjamin dapat terselenggaranya kegiatan PON XV-2000. Selain kelengkapan sarana dan prasarana olahraga, Jawa Timur juga terletak strategis dan mudah diakses dari seluruh pelosok tanah air.

Keputusan dan penunjukan Jawa Timur sebagai Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XV pertama pada masa peralihan dari orde baru menjadi pemerintahan reformasi yang ditandai dengan krisis ekonomi dan politik di Indonesia.⁷ Penunjukan Jawa Timur pada tahun 1997, yang mana pada saat itu Basofi Sudirman menjabat sebagai gubernur Jawa Timur di akhir periode masa jabatannya, membuat H. Imam Utomo selaku gubernur baru yang menggantikan Basofi Sudirman ditunjuk sebagai Ketua Umum Panitia Besar PON XV. Penyelenggaraan PON XV ini bisa dikatakan sebagai pesta olahraga nasional yang termegah dan terbesar jika dibandingkan dengan penyelenggaraan PON sebelumnya yang pernah dihelat di Indonesia.

Tugas yang diberikan KONI Pusat tersebut sangat berat. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah hanya memberikan biaya separuh yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan perhelatan olahraga nasional ini. Itu berarti untuk menutup kekurangan biaya PON XV harus ditanggung dan

⁷ “PON XV/2000 Jatim, Pertaruhan Yang Dibayangi Disintegrasi” (Surabaya Post, 13 Juni, 2000), hlm. 10.

diupayakan oleh panitia besar PON XV.⁸ Hal tersebut menjadi salah satu faktor permasalahan yang muncul ketika Jawa Timur ditunjuk sebagai panitia pelaksana dan tuan rumah PON XV.

Selain masalah pendanaan atau biaya penyelenggaraan PON XV yang kekurangannya harus ditanggung sendiri, adapun juga masalah yang muncul, yakni adanya kondisi yang sama seperti pada kondisi PON I di Solo yang ditandai dengan krisis politik dan PON VII di Surabaya yang ditandai dengan adanya krisis ekonomi. Keduanya menumpuk pada penyelenggaraan PON XV 2000 di Jawa Timur saat ini.⁹

Menurut penuturan H. Imam Utomo sebagai Ketua Umum Panitia Besar PON XV, biaya penyelenggaraan PON ini diperkirakan mencapai 61 miliar dan separuhnya harus ditanggung oleh panitia pelaksana¹⁰. Hal ini dikarenakan dana yang diberikan oleh Pemerintah tidak mencukupi sehingga muncul ide dan gagasan untuk mengupayakan dana lain yang diusahakan secara mandiri. Usaha itu dengan menggandeng PT Lasindo Multimedia 2000, sebagai mitra Panitia Besar PON untuk urusan dana dan promosi. Sebagai kelanjutan dari ide gagasan itu, pihak urusan dana dan promosi harus jungkir balik untuk pengumpulan dana karena panitia tidak menghendaki adanya pengumpulan dana dengan model penjualan kupon lotre seperti yang dilakukan pada PON VII 1969 yang lalu.

⁸ “Gubernur Setuju DPRD Panggil Panpel PON”, (Surabaya Post, 25 Februari, 2000), hlm. 8.

⁹ *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹⁰ *Op.Cit.*, hlm. 8.

Akhirnya, Lasindo berusaha menghimpun dana dari masyarakat dan pihak swasta.

Perhatian masyarakat yang semakin baik dan meningkat terhadap olahraga perlu diarahkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan pengembangan kegiatan olahraga di Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat harus dapat ditingkatkan dengan penggalangan yang baik dan terpadu. Disamping itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk sponsorship pada kegiatan PON XV harus lebih ditingkatkan dan diatur sebaik-baiknya dengan tetap menjaga ciri-ciri kegiatan olahraga prestasi yang utuh dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan PON XV-2000.

Dari pemaparan tersebut, kiat penyelenggaraan PON XV yang digaungkan oleh tuan rumah Jawa Timur dalam mencapai kesuksesan kegiatan olahraga nasional ini adalah, penancangan tri sukses yang berarti sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses pemberdayaan ekonomi. Sejalan dengan itu, penelitian ini berjudul “*Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XV tahun 2000 di Jawa Timur*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, maka penelitian ini mengkaji Penyelenggaraan PON XV di Jawa Timur dengan menggunakan perspektif sejarah. Hal yang akan dikaji tersebut terangkum dalam rumusan masalah dibawah ini.

1. Mengapa penyelenggaraan PON XV Tahun 2000 dilaksanakan di Jawa Timur serta bagaimana persiapan pelaksanaannya?

2. Bagaimana dampak penyelenggaraan PON XV bagi masyarakat dan Provinsi Jawa Timur baik dalam kemajuan keolahragaan maupun sektor pembangunan infrastruktur secara umum?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan ini memiliki tujuan dan manfaat berdasarkan pada rumusan masalah.

Tujuan penulisan :

1. Untuk menjelaskan lebih jauh alasan penunjukkan Jawa Timur sebagai tuan rumah PON XV-2000.
2. Untuk menjelaskan lebih jauh mengenai persiapan Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam mempersiapkan PON XV-2000.
3. Untuk menjelaskan dampak penyelenggaraan PON XV-2000 bagi masyarakat dan Provinsi Jawa Timur dalam kemajuan bidang olahraga.

Adapun manfaat dari penelitian ini berdasarkan pada tujuan penelitian di atas adalah:

1. Menjadi sumbangsih dalam penulisan sejarah terutama mengenai sejarah olahraga di Indonesia.
2. Menambah wawasan bagi pembaca mengenai dampak PON XV-2000 terhadap perkembangan olahraga di Jawa Timur.
3. Memberikan sumbangsih tertulis dalam upaya dokumentasi memori kolektif masyarakat Jawa Timur mengenai PON XV tahun 2000.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Pemilihan penulisan batas temporal adalah tahun 2000 karena fokus kajian pada peristiwa penyelenggaraan kompetisi olahraga PON XV di Jawa Timur yang berlangsung tanggal 19 Juni 2000 sampai 30 Juni 2000 beserta hal-hal yang melandasi diadakannya pesta olahraga nasional tersebut. Dalam tulisan ini juga disinggung mengenai tahun 1997-1999. Hal ini didasarkan pada dimulainya perencanaan dan penyelenggaraan renovasi infrastruktur sarana dan prasarana oleh pemerintah Jawa Timur yang akan digunakan dalam penyelenggaraan PON XV. Hal ini dibuktikan dengan perbaikan jalan-jalan, bangunan stadion, gedung-gedung olahraga, serta penambahan penerangan jalan-jalan yang berada di dalam kota.

Penelitian ini mengambil Provinsi Jawa Timur dalam rentang tahun 2000 sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan pada Provinsi ini merupakan tempat penyelenggaraan acara pesta olahraga nasional PON XV-2000. Kali ini penyelenggaraan PON tidak dipusatkan di satu wilayah saja, melainkan dilaksanakan di beberapa daerah di wilayah Jawa Timur. Seperti Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Kediri, Kota Malang, Kabupaten Malang, Jember, Pasuruan, Situbondo dan Bondowoso.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa literatur rujukan baik buku- buku sejarah tentang olahraga maupun skripsi yang pernah membahas mengenai tema serupa.

Literatur pertama adalah buku “Jejak Langkah KONI 1938-2015”.¹¹ Oleh Daryady dkk, buku ini menggambarkan pasang surut kesuksesan olahraga Indonesia dengan berbagai konstelasi politik dalam negeri yang mengiringi perjalanannya. KONI selaku induk yang menaungi olahraga ini menjelaskan perjalanan panjang Indonesia dalam mengadakan perhelatan olahraga di tingkat nasional dan internasional. Buku ini akan digunakan untuk referensi tentang peran pemerintah dalam olahraga Indonesia.

Buku selanjutnya yang menjelaskan mengenai “Sejarah Olahraga Indonesia”.¹² Oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, buku ini memaparkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan olahraga di Indonesia dari zaman kerajaan, kolonial dan kemerdekaan hingga saat ini. Penulis menggunakan buku ini sebagai referensi dalam hal penjelasan dan pengetahuan tentang olahraga dilaksanakan di Indonesia.

Literatur lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku mengenai “Pekan Olahraga Nasional (PON) I-X: Sejarah Ringkas dan Perkembangannya”,¹³ oleh Sorip Harahap, buku ini memberikan gambaran mengenai Pekan Olahraga Nasional yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Mulai dari PON I di Solo tahun 1948 hingga PON X di Jakarta tahun 1981. Akan tetapi penjelasan dari buku ini masih kurang detail untuk menguraikan dinamika yang terjadi pada setiap daerah yang menjadi tuan

¹¹ Daryady dkk, “*Jejak Langkah KONI 1938-2015*”, (Jakarta: Komite Olahraga Nasional Indonesia, 2015).

¹² Menpora, “*Sejarah Olahraga Indonesia*”, (Jakarta: Kantor Menpora, 1991).

¹³ Sorip Harahap, “*PON I-X Sejarah Ringkas dan Perkembangannya*”, (Jakarta: Kantor KONI Pusat, 1985).

rumah pesta olahraga empat tahunan ini.

Gambaran lain yaitu mengenai penyelenggaraan PON XV 2000 di Jawa Timur adalah Skripsi yang berjudul “Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke VII tahun 1969 di Surabaya”.¹⁴ Oleh Kharisma Purnamasari Dalam karya skripsi menjelaskan mengenai sejarah penyelenggaraan PON VII di Surabaya yang ditinjau dari hubungan politik olahraga, dan erat kaitannya dengan legalisasi Lotto PON sebagai penghimpun dana dari penyelenggaraan PON di Surabaya. Penulis menggunakan skripsi ini sebagai rujukan mengenai perbandingan ketika Jawa Timur menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON.

Dari penelitian tentang Pekan Olahraga Nasional tersebut yang membedakan penelitian ini adalah penulis mencoba menjelaskan kondisi masyarakat Jawa Timur dari awal penyelenggaraan PON XV hingga berakhirnya kompetisi olahraga ini pada tahun 2000. Kajian ini juga memberikan penjelasan mengenai awal penunjukan Jawa Timur menjadi tuan rumah PON XV, bentuk dan dampak penyelenggaraan PON XV. Penulis juga memberikan gambaran tentang reaksi serta fenomena sosial yang terjadi ketika pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sebagai cara terbaik untuk menggalang dana bagi penyelenggaraan PON XV di Jawa Timur.

¹⁴ Kharisma Purnamasari, “*Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke VII tahun 1969 di Surabaya*”, FIB, UNAIR, 2018.

1.6 Kerangka Konseptual

Sebagai sarana sosial atau politik, olahraga mempunyai hubungan yang sama dalam kerangka pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat melalui prestasi para atlet dalam suatu negara. Karena perannya yang mendesak dan strategis dalam kemajuan peradaban manusia, PBB menegaskan bahwa olahraga dapat berdampak pada pembangunan dan misi pemeliharaan perdamaian negara. Olahraga adalah bagian dari sarana sosial yang memperjuangkan nilai-nilai positif bagi diri sendiri dan yang lebih penting untuk kemajuan negara melalui keikutsertaan dalam kompetisi olahraga tingkat tinggi.

Menyadari adanya keterkaitan antara kedudukan sosial dan politik, elit sosial dan politik menyelenggarakan berbagai acara olahraga untuk menguji kualitas sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam kompetisi, diikuti oleh kontingen daerah di kompetisi nasional dan kontingen negara di kompetisi internasional. Olahraga memberikan peluang bagi daerah dan negara untuk berkompetisi dan berpartisipasi dalam semua cabang olahraga karena olahraga dianggap sangat penting dengan memberikan dampak positif bagi suatu daerah dan negara. Berdasarkan peran strategis dalam pembentukan jiwa kemanusiaan dan nasionalisme yang tinggi, kegiatan olahraga juga dimanfaatkan secara politis oleh masing-masing daerah dan negara tuan rumah guna memperoleh dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan lainnya untuk meningkatkan taraf hidup.

Dalam menyelesaikan penelitian sejarah, setidaknya dibutuhkan ilmu

bantu dari disiplin ilmu-ilmu sosial, berupa teori maupun konsep. Hal ini disebut juga pendekatan sosial dalam metodologi sejarah. Penelitian ini menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu konsep olahraga, kompetisi, infrastruktur, pembangunan.

Olahraga merupakan istilah yang sudah lama populer di Indonesia. Olahraga sebagai aktivitas sehari-hari kemudian dikembangkan sebagai sarana pembangunan peradaban. Dari pembinaan sistematis dalam kelompok kecil hingga menyiapkan kompetisi olahraga. Di kancah internasional, perkembangan olahraga Indonesia jelas tertinggal dari negara lain. Olahraga global benar-benar masuk ke Indonesia pada era kolonial. Namun perkembangan pesat baru terasa pada era Orde Baru sejak munculnya program “*Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat*” kemudian dengan slogan “*Tiada hari tanpa olahraga*”.¹⁵ Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden No. 131 tahun 1962,¹⁶ olahraga mempunyai arti yang seluas-luasnya, yang meliputi segala kegiatan/usaha mendorong, membangkitkan, mengembangkan dan membina kekuatan-kekuatan jasmani maupun rohani pada setiap manusia.

Sebagai kata majemuk berasal dari kata olah dan raga.¹⁷ Arti kedua kata

¹⁵ Harsuki, “*Perkembangan Olahraga Terkini*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30. Kebijakan pemerintah terhadap olahraga pada era kepemimpinan Soeharto, tepatnya pada tanggal 19 Januari 1981 pada Musyawarah Olahraga Nasional IV di Istana Negara: Soeharto mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengibarkan Panji Olahraga Nasional yaitu; “*Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat*.”

¹⁶ Keputusan Presiden No. 131 tahun 1962, tentang Tugas, Wewenang dan Bidang Pekerjaan Departemen Olahraga.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 278.

tersebut adalah usaha untuk mengubah atau mematangkan, seperti halnya mengolah tanah yang artinya menyiapkan tanah agar dapat ditanami. Menurut Singgih D. Gunarsa, secara umum, olahraga adalah suatu proses sistematis dalam bentuk kegiatan atau usaha apapun yang dapat mendorong, mengembangkan, dan meningkatkan potensi fisik dan mental seseorang sebagai individu atau masyarakat, yang dituangkan ke dalam bentuk permainan, kompetisi, kontes, dan pencapaian tertinggi yang ingin dicapai.¹⁸

Sederhananya, semua orang dapat berolahraga, kapan saja, di mana saja, tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, dan sebagainya. Toho Cholikh Mutohir¹⁹ menjelaskan bahwa, hakikat olahraga adalah sebagai refleksi kehidupan masyarakat suatu bangsa. Dalam olahraga, aspirasi dan nilai luhur suatu masyarakat diwujudkan menjadi aspirasi ekspresi diri melalui prestasi olahraga. Sering kali mendengar bahwa kemajuan suatu negara dapat tercermin dari prestasi olahraganya. Olahraga di Indonesia diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana memajukan gerakan sosial untuk menghasilkan manusia transendental yang memiliki kemampuan fisik, mental, intelektual, dan sosial untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya.

Douglas Hartmann dan Christina Kwauk²⁰ mengatakan pada dasarnya olahraga adalah tentang partisipasi. Olahraga menghubungkan individu dan

¹⁸ Singgih D Gunarsa dkk, “*Psikologi Olahraga*”, (Jakarta: PT Gunung Mulia, 1989), hlm. 137-138.

¹⁹ Cholikh dan Maksum, “*Sport Development Index: Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan*”, (Jakarta: PT INDEKS, 2007), hlm.2

²⁰ Douglas Hartman & Christina Kwauk. Sport and Development: An Overview, Critique, and Reconstruction. Jurnal of sport and sosial Issue nomor 35 volume 3 2011. diakses pada 25 Oktober 2022 di https://www.researchgate.net/publication/258158933_Sport_and_Development_An_Overview_Critique_and_Reconstructionv

komunitas, menonjolkan kesamaan, dan menjembatani perbedaan budaya atau etnis. Olahraga menyediakan forum untuk mempelajari keterampilan seperti disiplin, percaya diri dan kepemimpinan, dan mengajarkan prinsip-prinsip dasar seperti toleransi, kerjasama dan rasa hormat. Olahraga mengajarkan kita nilai kerja keras dan bagaimana menghadapi menang dan kalah. Menekankan aspek positif dari olahraga membuatnya menjadi kendaraan yang kuat.

Berdasarkan uraian para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa olahraga adalah kegiatan fisik yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut: Permainan didasarkan pada kemampuan dan kesenangan dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat, tergantung pada sikap penafsirnya. Hal ini dikarenakan perbedaan definisi olahraga disebabkan oleh karakteristik olahraga itu sendiri yang semakin meningkat, berubah dan semakin kompleks, baik dari segi jenis kegiatannya maupun sifat kegiatannya.

Kegiatan olahraga tidak lepas dari adanya kompetisi berupa perlombaan atau pertandingan olahraga yang dijalankan sesuai program atau tidak terprogram ke dalam kalender kegiatan cabang olahraga yang ada. Baik itu dalam bentuk *single event competition* (pertandingan tunggal) maupun *multi event* (pertandingan berbagai cabang olahraga). kompetisi apa pun, besar atau kecil diperlukan manajemen yang tepat. Kegiatan penyelenggaraan meliputi perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi, serta pelaporan. Sesuai dengan ciri utama olahraga (khususnya olahraga kompetitif) yang menekankan pada prinsip pencapaian prestasi, membuat rekor atau memenangkan gelar juara, tujuan utama dari kompetisi atau kontes adalah untuk menentukan yang terunggul atau

terbaik. Ada juga tujuan pelengkap lainnya, seperti pencarian bakat, mengukur hasil pelatihan, atau cara menilai kemajuan dalam aspek yang lebih spesifik seperti keterampilan, kemampuan fisik, dan aspek mental.

Menurut Deaux, Dane, & Wrightsman,²¹ kompetisi adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Individu atau kelompok memilih untuk bekerja sama atau bersaing berdasarkan struktur penghargaan dalam suatu situasi. Menurut Chaplin,²² kompetisi adalah saling mengatasi dan berjuang antara dua individu, atau antara beberapa kelompok untuk memperebutkan objek yang sama.

Kompetisi juga sering diadakan secara serentak atau bersamaan di semua cabang (*Multi Event*) atau diselenggarakan oleh cabang olahraga tertentu (*Single Event*), sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 tahun 2007.²³ Dalam pasal 2 ayat 2 bentuk multy event meliputi: 1) Pekan Olahraga Internasional, 2) Pekan Olahraga Nasional, 3) Pekan Olahraga Wilayah, dan 4) Pekan Olahraga Daerah, sedangkan single event (Kompetisi tunggal) dalam ayat 3 meliputi : 1) Kompetisi Olahraga Tingkat Internasional, 2) Kompetisi Olahraga Tingkat Nasional, 3) Kompetisi Olahraga Tingkat Wilayah, dan 4) Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah. Tujuan dari penyelenggaraan pertandingan sebagaimana tertuang dalam PP nomor 17 tahun 2007 pasal 5 ayat 1 adalah untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan

²¹ Deaux, K., Dane, F.C., Wrightsman, L.S. “*Social Psychology in the 90’s*” (6th ed.). California : Cole.1993.

²² Chaplin, J. P. “*Kamus Lengkap Psikologi*”, penerjemah, Kartini Kartono (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).

²³ PP No. 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan kejuaraan olahraga.

harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga.

Berdasarkan konsep kompetisi, dapat dikatakan bahwa kompetisi olahraga adalah tempat berlangsungnya kompetisi atau pertandingan di mana atlet menunjukkan kemampuannya untuk mengalahkan atlet lain dengan mencetak prestasi. Dimana para atlet dapat bertanding dalam pertandingan tunggal dan berbagai event nasional maupun internasional. Prestasi para atlet tersebut menjadi penghargaan bagi para atlet daerah dan negara yang diwakilinya.

Olahraga menjadi satu kebutuhan setiap orang dalam hidupnya, timbul suatu masalah, yaitu: kebutuhan akan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan olahraga. Demi kenyamanan dan kelancaran dalam melakukan kegiatan olahraga tersebut, juga perlu fasilitas yang baik dan memenuhi standar olahraga. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional No. 3 tahun 2005.²⁴

Vladimir Hobza, Tomas Dohnal,²⁵ infrastruktur merupakan salah satu kondisi dasar yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan kolektif dan individu. Di negara maju, infrastruktur olahraga telah dibangun sesuai dengan standar dan peraturan yang berbeda untuk setiap negara. Perencanaan desain infrastruktur olahraga berdasarkan analisis perkembangan saat ini. Peningkatan prerstasi

²⁴ UU No. 3 tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

²⁵ Vladimir Hobza, Tomas Dohnal. *"Theoretical Foundations Of Municipal Sport Infrastructure Development Conceptual Planning"*, (Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn. 2008), vol. 38, no. 4

olahraga umumnya dikaitkan dengan penyediaan fasilitas olahraga yang baik pula. Penyediaan fasilitas olahraga juga merupakan salah satu faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Menurut Jackie Grieve, Emma Sherry,²⁶ fasilitas olahraga memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, mayoritas pengguna fasilitas menyatakan bahwa fasilitas olahraga berdampak positif bagi mereka, tidak hanya mencapai manfaat fisik tetapi juga memperkuat komunitas olahraga dan meningkatkan partisipasi olahraga bagi masyarakat. Namun, penyediaan fasilitas olahraga memerlukan dukungan dana dari pemerintah, pemerintah daerah atau organisasi olahraga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa prasarana olahraga adalah gedung olahraga, aula serbaguna, lapangan bermain, kolam renang sebagai tempat untuk melakukan kegiatan olahraga. Sarana olahraga adalah alat yang digunakan untuk berlatih setiap cabang olahraga guna mencapai keterampilan atau prestasi tertentu. Kemudian, sarana dan prasarana olahraga adalah alat dan karya yang dirancang sesuai persyaratan tertentu, yang digunakan sebagai alat dan tempat untuk melakukan kegiatan olahraga.

Menurut Cholik dan Maksum,²⁷ olahraga (*sport*) tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan (*development*). Istilah “olahraga” sebenarnya bukan

²⁶ Jackie, Grieve., Emma, Sherry. “*Community benefits of major sport facilities: The darebin international sports centre. Sport management association of Australia and New Zealand*”, Published by (Elsevier Ltd. All rights reserved. 2012), pp.218-229.

²⁷ Cholik dan Maksum, “*Sport Development Index: Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan*”, (Jakarta: PT INDEKS, 2007), hlm.2

terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggris “sport”. Olahraga berasal dari bahasa Jawa “olah” yang berarti berlatih atau melakukan kegiatan; dan “raga” berarti fisik atau jasmani. Berolahraga berarti melakukan aktivitas fisik. Olahraga didefinisikan sebagai segala aktivitas fisik yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.

Sementara itu, istilah “pembangunan” berarti suatu proses, metode, atau tindakan konstruksi. Membangun berarti membuat sesuatu. Proses itu sendiri mengandung ciri-ciri adanya serangkaian tindakan, interaksi, elaborasi, perubahan atau pengolahan yang menghasilkan sesuatu. Dengan demikian, istilah pembangunan lebih mengacu pada proses daripada hasil. Menurut B. Christine Green,²⁸ sistem pembangunan olahraga mempunyai dua tujuan utama, yaitu meningkatkan jumlah masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, meningkatkan kualitas kegiatan olahraga, dan organisasi olahraga.

Berdasarkan konsep olahraga dan pembangunan yang sudah dijelaskan, dapat diambil pernyataan bahwa pembangunan olahraga pada dasarnya adalah proses yang memberi manusia akses besar ke aktivitas (fisik). Ia harus memberi atau memungkinkan setiap orang untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial secara keseluruhan. Dalam hal ini, pembangunan olahraga dikaitkan dengan upaya membangun manusia Indonesia yang berkualitas dan dalam rangka pencapaian tujuan nasional, khususnya

²⁸ Christine Green. “*Building sport programs to optimize athlete recruitment, retention, and transition: Toward a normative theory of sport development*”, *Journal of (Sport Management, Human Kinetics, 2005), Inc.* 19, 233-253.

masyarakat yang demokratis, adil dan sejahtera secara jasmani dan rohani.

Lahirnya Pekan Olahraga Nasional adalah salah satu bentuk nyata dari pembangunan olahraga di Indonesia. Sebab, tidak hanya nilai-nilai keolahragaan saja yang termuat di dalamnya. Namun secara historis pelaksanaan PON yang pertama syarat akan semangat politik dan kultural bangsa Indonesia. Dimana nilai-nilai tersebut sejalan dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia.

Penyelenggaraan PON I di Solo Tahun 1948 tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia yang pada waktu itu bertekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat penuh. PON merupakan ajang olahraga yang dapat menjaring potensi atlet di wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kegiatan olahraga yang ada di Indonesia, keberadaan PON tidak terlepas dari perjalanan bersejarah PORI sebagai induk organisasi penyelenggara olahraga di tanah air pada tahun 1946. Dengan berdirinya organisasi-organisasi olahraga tersebut mendorong PON I di Solo diselenggarakan pada tahun 1948.

Implementasi untuk konsep tersebut bagi penyelenggaraan PON dan perannya bagi Indonesia terletak pada bagaimana upaya keberhasilan pembinaan olahraga Nasional. Menurut Toho Cholik Mutohir,²⁹ SDI (*Sport Development Index*) diperlukan sebagai indikator keberhasilan pembinaan olahraga. Selama ini keberhasilan pembinaan olahraga selalu diukur dengan perolehan medali. Bersama dengan Ali Maksum, Toho Menjelaskan bahwa

²⁹ *Op.cit.*, hlm. 6

keberhasilan pembangunan olahraga di suatu negara harus diukur dengan 4 dimensi: (1) ketersediaan ruang terbuka untuk olahraga, (2) keterlibatan masyarakat, (3) sumber daya manusia (SDM), dan (4) tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

Tujuan diselenggarakannya PON terutama sebagai wadah dan tempat pertemuan para atlet terpilih dari semua tingkat daerah di Indonesia yang dinilai memiliki prestasi dibidang olahraga yang terlibat dalam kompetisi atau kontes. *Kedua*, untuk mempersatukan organisasi-organisasi dari seluruh cabang olahraga dalam *event* besar. *Ketiga*, mempererat hubungan antar generasi muda agar tumbuh persatuan dan rasa persahabatan, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. *Keempat*, memperdalam pengalaman dan pengetahuan kompetisi, teknik dan organisasi untuk mencetak atlet-atlet baru yang potensial. *Kelima*, sebagai ajang pemanasan dalam rangka persiapan penyelenggaraan pesta olahraga internasional.³⁰

Hasil dan manfaat penyelenggaraan PON sejak yang pertama hingga PON XIV tahun 1996 di Jakarta telah dirasakan bersama, terutama turut serta dalam proses terwujudnya stabilitas politik melalui persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, peneliti akan mengkaji PON XV tahun 2000 di Jawa Timur pada kaitannya dengan pembangunan dan dampaknya terhadap kesatuan bangsa pasca terjadinya peristiwa politik di rentang waktu antara 1996-2000 yang cukup pelik. Olahraga

³⁰ Roesdiyanto dan I Nengah Sudjana, “*Sejarah Olahraga dan Pendidikan Jasmani*”, (Malang: Universitas Negeri Malang Press UM PRESS, 2009), hlm. 125-126

membuktikan mampu mengakomodasi kepentingan persatuan nasional melalui jalan kompetisi yang sportif meskipun suasana politik negara sedang tidak baik-baik saja.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang penyelenggaraan PON XV dan dampaknya di Jawa Timur pada tahun 2000. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah penjelasan yang deskriptif dan naratif. Data yang diperoleh dianalisis untuk menjawab terhadap masalah yang diidentifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mensintesis sumber-sumber fakta pada tema yang terkait. Metode penelitian sejarah digunakan sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis berupa rekaman dan peninggalan sejarah di masa lalu.³¹

Penulisan ini didasari pada penelitian dengan memperhatikan kondisi pembangunan khususnya pada bidang olahraga di Jawa Timur pada masa itu. Analisa historis yang dilakukan dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara jelas tentang corak dan pola masalah yang serupa dalam bentuk narasi sejarah. Secara spesifik, tulisan ini adalah model historiografi olahraga dengan sedikit mengulas mengenai skema kompetisi PON yang tentunya memberikan dampak pada pembangunan.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode

³¹ Louis Gottschalk. *"Mengerti Sejarah Terjemahan"*. 1986: 32

penelitian sejarah. Metode sejarah adalah bagaimana cara mengetahui sejarah sehingga sejarawan perlu mengetahui tata cara penelitian sejarah untuk menjelaskan suatu peristiwa sejarah.³² Penelitian ini melalui empat tahapan, yaitu Heuristik (pengumpulan sumber), Verifikasi (klasifikasi sumber), interpretasi (sintesis dan analisis) dan Historiografi (penulisan sejarah).

Langkah pertama yang penulis ambil adalah heuristik. Penulis mencoba mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan. Pada tahap ini, sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa dokumentasi arsip PON XV Tahun 2000 dan surat kabar. Untuk sumber sekunder, berupa buku-buku yang bersangkutan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan atas penulisan ini.

Pencarian sumber primer penelitian ini dilakukan di berbagai tempat, seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya dan Pusat Informasi Kompas Yogyakarta. Sedangkan pencarian sumber sekunder berupa buku-buku literatur dan artikel jurnal dilakukan di Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Tahap kedua adalah kritik sumber, yang terdiri dari kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal berupa verifikasi keaslian, orisinalitas, turunan, pemalsuan, relevansi sumber, serta masalah bentuk fisik sumber. Kritik eksternal menetapkan fakta pernyataan seseorang bahwa pernyataan tersebut

³² Gazalba. S, “*Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*”, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1981), hlm.3.

didasarkan pada fakta yang telah terjadi dan tidak berubah. Dalam kritik internal, yaitu kritik terhadap konten atau isi sumber, validitas sumber, kesesuaian isi yang dijelaskan dalam sumber terkait dipertimbangkan. Penulis akan berusaha memastikan bahwa data yang diperoleh adalah benar.

Sebelum melakukan tahap interpretasi, penulis terlebih dahulu mengklasifikasikan sumber-sumber yang diperoleh. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penulisan saat menggunakan sumber. Penggolongan ini didasarkan pada kesamaan tahun terbit sumber dan isi sumber, sehingga peristiwa yang terjadi dapat dilihat dan dicari pembahasan yang detail dan prosedural dari suatu masalah.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yang terdiri dari menafsirkan kembali dan memahami sumber-sumber yang ada sebelum sejarah ditulis. Pada tahap ini, penulis mencoba menemukan hubungan antara fakta yang ditemukan, baik dalam buku, surat kabar maupun arsip. Sehingga bisa dirangkai dalam sebuah peristiwa sejarah.

Tahapan terakhir adalah historiografi, dalam tahap ini penulis Menyusun secara tertulis fakta-fakta yang ditafsirkan, yang setelah melalui proses kritik sumber dan interpretasi data menjadi catatan sejarah tertulis yang sesuai dengan kaidah penulisan sejarah.

1.8 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab sesuai dengan temuan data dan pembahasan yang akan dilakukan.

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penulisan, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Pada bab II yang berjudul Perencanaan PON XV di Jawa Timur. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai perbandingan PON VII yang diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1969 dan PON XIV di Jakarta tahun 1996 dengan PON XV-2000 di Jawa Timur. Selain itu akan dijelaskan mengenai penunjukkan Jawa Timur sebagai tuan rumah PON XV-2000.

BAB III yang berjudul Pelaksanaan PON XV di Jawa Timur. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan PON XV-2000, yang mana akan menjelaskan rangkaian pelaksanaan PON XV-2000. Kemudian pada bab III juga menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Panitia Besar PON XV-2000. Selain itu, pada bab III juga menjelaskan dampak PON XV terhadap kemajuan olahraga dan pembangunan di Jawa Timur.

BAB IV menjadi bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.